

TE S I S

DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP KEWENANGAN KREDITOR PEMEGANG HAK FIDUSIA UNTUK EKSEKUSI OBJEK JAMINAN AKIBAT DEBITOR WANPRESTASI

**Untuk Memenuhi Persyaratan
Guna Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Hukum
Fakultas Hukum Wijaya Kusuma Surabaya**



OLEH :

MOCHAMAD MUHSIN

NPM : 19310002

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA SURABAYA**

2023

TESIS
DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP KEWENANGAN
KREDITOR PEMEGANG HAK FIDUSIA UNTUK
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN AKIBAT DEBITOR
WANPRESTASI

DIAJUKAN OLEH:

MOCHAMAD MUHSIN
NPM :19310002

TESIS INI TELAH DISETUJUI UNTUK DIUJI

Tanggal 25 Januari 2023

Oleh:

Pembimbing I

Pembimbing II

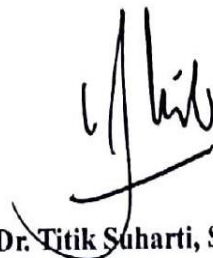


Prof. Dr. H. Mochamad Isnaeni, S.H., M.S.
NIDN. 12672 – ET, 8807440017

Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum
NIDN. 9098 – ET, 0720016401

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma



Dr. Tjiti Suharti, S.H., MHum

TESIS
DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI
NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP KEWENANGAN
KREDITOR PEMEGANG HAK FIDUSIA UNTUK
EKSEKUSI OBJEK JAMINAN AKIBAT DEBITOR
WANPRESTASI




Dipersiapkan dan disusun oleh :

MOCHAMAD MUHSIN

NPM :19310002

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada Tanggal, 30 Januari 2023

Susunan Dewan Penguji

Nama Penguji		Tanda Tangan
Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.	Ketua	
Dr. Edi Krisharyanto, S.H., M.H.	Anggota	
Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum	Anggota	

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister Hukum

Tanggal 2 Februari 2023

Ketua Program Studi Magister Hukum


Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : MOCHAMAD MUHSIN
NPM : 19310002
Alamat : Jl. Cempaka Nomor 66 RT/ RW 005/005
Pesangrahan – Kota Batu
No. Telp (HP) : 085231714712

Menyatakan bahwa Tesis yang berjudul **“DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP KEWENANGAN KREDITOR PEMEGANG HAK FIDUSIA UNTUK EKSEKUSI OBJEK JAMINAN AKIBAT DEBITOR WANPRESTASI”** adalah murni gagasan saya yang belum pernah saya publikasikan di media, baik majalah maupun jurnal ilmiah dan bukan tiruan {plagiat} dari karya orang lain.

Apabila ternyata nantinya rancangan penelitian ini ditemukan adanya unsur plagiarisme maupun autoplagarisme, saya siap menerima sanksi akademik yang akan ditentukan oleh fakultas.

Demikian pernyataan ini saya buat sebagai bentuk pertanggungjawaban etika akademik yang harus dijunjung tinggi di lingkungan perguruan tinggi.

Surabaya, 25 Januari 2023

Yang Menyatakan,



Mochamad Muhsin
NPM 19310002

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP KEWENANGAN KREDITOR PEMEGANG HAK FIDUSIA UNTUK EKSEKUSI OBJEK JAMINAN AKIBAT DEBITOR WANPRESTASI”** ini tepat pada waktu yang di harapkan. Adapun tujuan dari penulisan Tesis ini adalah menemukan asas keadilan serta dampak hukum setelah diterbitkannya putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 terhadap kelangsungan usaha perusahaan pembiayaan (kreditor) dan konsumen (debitur).

Saya menyadari, Tesis yang saya tulis ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun akan saya nantikan demi kesempurnaan dalam penulisan tesis ini.

Tesis ini dapat terselesaikan berkat bimbingan dan bantuan, untuk itu peneliti menyampaikan terima kasih kepada:

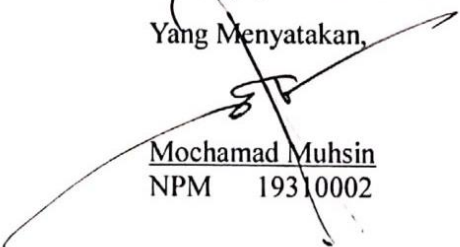
1. Prof. Dr. H. Widodo Ario Kentjono, dr. Sp.THT-KL (K), FICS, Selaku Rektor Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
2. Dr. Umi Enggarsasi, S.H., M.Hum, Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya.
3. Dr. Titik Suharti, S.H., M.Hum, Selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum.
4. Prof. Dr. H. Mochamad Isnaeni, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I dan Dr. Dwi Tatak Subagiyo, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, dorongan dengan sabar sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
5. Para Dosen Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wijaya Kusuma Surabaya yang telah memberikan ilmu serta wawasan yang bermanfaat selama pendidikan.
6. Ayahanda dan Ibunda (Alm), serta seluruh saudara-saudaraku terkasih dan keluargaku tercinta yang telah memberi dorongan moral, semangat, dan doa yang tak pernah putus dan henti agar semuanya berjalan lancar.

7. Bapak Erwin H Poedjono S.E. Direktur Utama PT Dharma Lautan Utama armada pelayaran nasional yang telah memberikan kepercayaan dan dukungan moral dan materiil selama proses menempuh pendidikan.
8. Pengurus Provinsi Keluarga Olahraga Tarung Derajat Jawa Timur, seluruh atlet dan pelatih Tarung Derajat Jawa Timur yang selalu mendukung dan memberi support untuk terus maju dan berkarya di tengah masyarakat.
9. Segenap pimpinan dan staff beserta karyawan PT Indomobil Finance Indonesia Cabang Surabaya yang turut berperan serta agar tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.
10. Rekan seangkatan di Magister Hukum tahun 2019, Universitas Wijaya Kusuma Surabaya atas doa dan dukungan moral yang telah diberikan selama pengerjaan Tesis.

Akhir kata, semoga Tesis ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi semua pihak yang membutuhkan.

Surabaya, 25 Januari 2021

Yang Menyatakan,


Mochamad Muhsin
NPM 19310002

DAFTAR ISI

	HALAMAN
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Teoritis.....	11
F. Metode Penelitian	26
BAB II KARAKTERISTIK LEMBAGA JAMINAN FIDUSIA SEBAGAI SARANA PENGIKAT BENDA AGUNAN	34
A. Sifat Perikatan.....	34
B. Ciri-ciri dan Unsur Jaminan Fidusia	36
C. Kebendaan dan Pembagiannya	41
D. Prosedur dalam Persetujuan Perjanjian Fidusia	46
E. Wanprestasi dalam Perjanjian Fidusia	48
BAB III EKSISTENSI PUTUSAN MK NO 18/PUU-XVII/2019 BAGI KREDITOR PEMEGANG JAMINAN HAK FIDUSIA DALAM PELAKSANAAN EKSEKUSI DEMI MENDAPATKAN PERCEPATAN PELUNASAN PIUTANG AKIBAT DEBITOR WANPRESTASI	56
A. Lahirnya Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019	56
B. Konstruksi Alur Pembiayaan dalam Lembaga Pembiayaan	59
C. Perikatan Debitur dan Kreditor	59

D. Penyelesaian Wanprestasi	61
E. Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Akibat Wanprestasi	66
F. Eksistensi Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019	70
BAB IV PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran	75
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Kewenangan Kreditor Pemegang Hak Fidusia Untuk Eksekusi Objek Jaminan Akibat Debitor Wanprestasi

Salah satu bisnis yang bersinggungan langsung dengan kehidupan ekonomi masyarakat adalah perusahaan leasing. Leasing adalah perjanjian yang berkenaan dengan kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang oleh *lessor* (pemberi sewa) untuk digunakan atau dimanfaatkan oleh *lessee* (penyewa) dalam jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

Penurunan pertumbuhan ekonomi yang terjadi di Indonesia pada masa pandemi juga berpengaruh ke bisnis usaha perusahaan leasing. Hal ini menyebabkan banyak konsumen yang gagal bayar. Selain itu adanya putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 juga mempersulit kinerja dari perusahaan leasing untuk mengembalikan laba yang hilang akibat banyak konsumen yang gagal bayar. Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019 ini mengatur agar parate eksekusi akibat debitor wanprestasi harus dilakukan eksekusi melalui putusan pengadilan apabila debitor menolak untuk dilakukannya eksekusi.

Karakteristik lembaga jaminan fidusia sebagai sarana pengikat benda agunan telah dibahas secara spesifik dan detail pada UUJF No 42 Tahun 1999 namun seiring dengan perkembangan jaman perlu ada spesifikasi yang lebih detail dalam penerapannya agar mampu menaungi permasalahan hukum yang terus menyesuaikan perkembangan jaman, seperti pembagian lebih spesifik lagi terkait macam benda terutama benda bergerak yang menjadi objek utama dalam jaminan fidusia yang di terapkan pada model bisnis leasing.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 terkesan mengkebiri kewenangan kreditor yang telah mencoreng asas keadilan. Dampak yang ditimbulkan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 sangat mempengaruhi kewenangan kreditor pemegang hak jaminan fidusia untuk melaksanakan eksekusi demi mendapatkan percepatan pelunasan piutang akibat debitor wanprestasi. Hal ini terjadi karena eksekusi harus melalui putusan pengadilan apabila debitor tidak berkenan dilakukan eksekusi walaupun telah terpenuhinya unsur wanprestasi. Selain itu juga eksekusi dengan nilai objek jaminan rendah akan sulit dilakukan karena terkait pembiayaan yang dikeluarkan tidak sebanding dengan nilai jual objek untuk menutupi sisa hutang.

Kata Kunci: Fidusia, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, Wanprestasi.

ABSTRACT

The Impact of Constitutional Courts Decision Number 18/PUU-XVII/2019 Against the Authority of Creditors of Fiduciary Rights Holders for the Execution of Collateral Objects Due to Default Debtors

One of the businesses that directly intersects with the economic life of the community is a leasing company. Leasing is an agreement relating to financing activities in the form of providing goods by the lessor to be used or utilized by the lessee within a certain period of time based on periodic payments.

The economic slowdown in Indonesia during the pandemic also affected the business of leasing companies. This causes many consumers failed to pay. In addition, there is Constitutional Courts Decision No. 18/PUU-XVII/2019 also makes it difficult for leasing companies to recover lost profits due to many consumers failing to pay. Constitutional Courts Decision No. 18/PUU-XVII/2019 stipulates that the execution due to a default debtor must be executed through a court decision if the debtor refuses to carry out the execution.

The characteristics of a fiduciary guarantee institution as a means of binding collateral objects have been discussed specifically and in detail in UUJF No. 42 of 1999, but along with the development of the times there needs to be more detailed specifications in its application so that it is able to cover legal issues that continue to adjust to changing times, such as more specific divisions related to types of objects, especially movable objects which are the main objects in fiduciary guarantees that are applied to the leasing business model.

The Constitutional Court Decision No 18/PUU-XVII/2019 seems to limit creditor's authority which has tarnished the principle of justice. The impact arising from the Constitutional Courts Decision No 18/PUU-XVII/2019 greatly affects the authority of creditors holding fiduciary guarantee rights to carry out executions in order to obtain accelerated settlement of receivables due to default debtors. This happens because the execution must go through a court decision if the debtor does not wish to be executed even though the element of default has been fulfilled. In addition, execution with a low collateral object value will be difficult because the financing issued is not proportional to the selling value of the object to cover the remaining debt.

Keyword: Constitutional Courts Decision Number 18/PUU-XVII/2019, Default, Fiduciary